

BERITA 1



Gambar 1 Berita Tirto.id
Sekjen PDI Perjuangan Kecam Kekerasan Terhadap Etnis Rohingya

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Hasbiyanto mengecam penindasan yang terjadi atas etnis Rohingya di Myanmar, baru-baru ini.

"PDI Perjuangan mendesak pemerintah Indonesia untuk secepatnya memberikan bantuan kemanusiaan dan langkah diplomasi," kata Hasbiyanto di Jakarta, seperti dikutip Antara, Sabtu (2/9/2017).

Ia melanjutkan, kejahatan kemanusiaan tidak bisa dibiarkan dan harus dihentikan. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri bertindak cepat dengan segera datang ke Myanmar.

PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan secepatnya melakukan diplomasi dengan pemerintah Myanmar guna mencari jalan damai untuk menyelesaikan persoalan.

Indonesia sebagai "Big Brother" di ASEAN, menurut dia, harus mengambil inisiatif atas konflik Rohingya. Dasarnya sangat kuat, yakni politik luar negeri Indonesia bebas aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Atas nama cita-cita perdamaian sebagai pelaksanaan sila kedua kemanusiaan atau internalionalisme, prakarsa aktif harus diambil, termasuk mendesak pemerintahan Myanmar untuk secepatnya menghentikan kekerasan atas warganya.

PDI Perjuangan berpendapat bahwa tindakan diplomasi yang cepat dan efektif melalui ASEAN sangat penting guna mencegah kekerasan lebih lanjut.

"PDI Perjuangan akan ikut ambil bagian dalam gerakan solidaritas sebagai kekuatan moral untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di Rohingya," kata Hasto.

Di tempat berbeda, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga mengutuk tragedi kemanusiaan atas etnis Rohingya.

"PMII mengutuk keras tindakan pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan terhadap saudara kita etnis Rohingya," kata Ketua Umum PB PMII Agus M Herlambang.

PMII mendesak pemerintah Myanmar segera mengambil langkah pasti untuk menyudahi konflik kemanusiaan yang telah berlangsung beberapa tahun itu. Apa pun jenis kasus dan persoalannya, sangat mungkin negara hadir untuk mencari titik temu dan menyudahi persoalan kemanusiaan yang sudah menelan korban ribuan manusia ini.

"Kecuali kalau Pemerintah Myanmar sendiri yang menjadi dalang konflik ini," kata Agus.

PMII mendukung pemerintah Republik Indonesia untuk terlibat dalam upaya menyudahi tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingnya yang mayoritas Muslim. Bahkan, PMII mendesak pemerintah Indonesia untuk mengusir kedutaan besar Myanmar dari tanah Indonesia jika masalah kemanusiaan ini tidak kunjung selesai.

"Tak terbantahkan akhir-akhir ini kembali kita mengelus dada melihat serangkaian pembantaian kepada saudara-saudara kita di Rohingya," kata Agus.

BERITA 2



Gambar 2 Berita Tirto.id
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan
Desak Pemimpin Dunia Bantu Rohingya

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak para pemimpin dunia untuk segera bertindak membantu warga Rohingya Myanmar, yang kini menghadapi tindakan upaya genosida.

Seperti diwartakan *Antara*, hampir 400 orang meninggal di barat laut Myanmar barat laut pada pekan lalu. Insiden ini buntut dari serangan gerilyawan Rohingya terhadap sejumlah pos keamanan yang memicu tentara melakukan serangan balasan.

Sampai saat ini diperkirakan ada 73.000 warga Rohingya telah melarikan diri ke negara tetangganya, Bangladesh, sejak kekerasan brutal yang dilakukan tentara itu terjadi.

"Anda dapat melihat bagaimana desa-desa dibakar ...Kemanusiaan tetap diam terhadap pembantaian di Myanmar," kata Erdogan.

Untuk itu, Erdogan mengatakan bahwa Turki akan mengangkat permasalahan itu ke Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York pada akhir bulan ini.

Sebagai pemimpin Organisasi Konferensi Islam (OKI), Erdogan juga telah membahas kekerasan masalah kemanusiaan itu dengan 20 pemimpin dari negara anggota OKI.

"Dengan beberapa pemimpin, kami dapat mencapai kesepakatan dan terdapat beberapa yang tidak tercapai. Tidak semua orang memiliki kepekaan yang sama," katanya dikutip dari *Antara*.

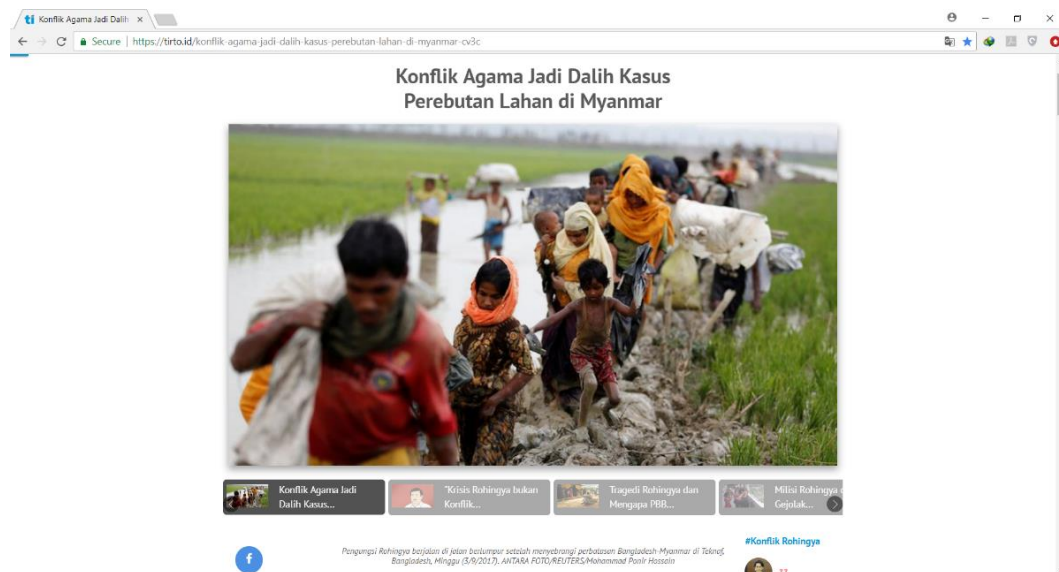
Ia juga menegaskan bahwa Turki akan terus memberikan pertolongan ke wilayah itu. "Kami akan melakukan tugas kami," kata Erdogan.

Myanmar telah mendesak warga Rohingya di wilayah barat laut agar mau bekerja sama dalam mencari para pemberontak, yang menggalang serangan terhadap sejumlah pos keamanan dan memicu serangan balasan dari pihak tentara. Serangan tersebut menjadi salah satu kekerasan paling mematikan yang melanda masyarakat Rohingya dalam beberapa dasawarsa belakangan.

Perlakuan diskriminatif Myanmar terhadap 1,1 juta Rohingya menjadi tantangan terbesar bagi pemimpin Aung San Suu Kyi, yang juga dikecam oleh para pembela HAM karena membiarkan penganiayaan terjadi terhadap kelompok minoritas.

Erdogan mengatakan bahwa kematian ratusan warga Rohingya di Myanmar selama sepekan belakangan, merupakan suatu bentuk genosida terhadap masyarakat di wilayah itu.

BERITA 3



Gambar 3 Berita Tirto.id
Warga Rohingya Mengungsi ke Bangladesh

Negara Bagian Rakhine di Myanmar yang menjadi tempat tinggal orang-orang etnis Rohingya kembali memanas.

Pemerintah Myanmar, melalui pasukan militernya, menyerang pemukiman warga Rohingya pada Kamis (31/8) malam atau Jumat (1/8) 5egar lalu. Dilansir dari ABC, sudah ada 130 orang dikabarkan meninggal akibat penyerangan tersebut.

Berdasarkan Persatuan Bangsa-Bangsa, seperti dikutip dari CNN, 5egara 50.000 warga Rohingya melarikan diri dari konflik tersebut. Sekitar 27.000 orang melintasi Bangladesh, sementara 20.000 warga Rohingya masih tersesat di Asia Tenggara.

Penyerangan brutal ini menandai kekerasan level baru 5egara55iv kasus serupa pada 2012 dan 2016. Baru-baru ini pasukan militer Myanmar memasuki salah satu areal warga Rohingya, menghancurkan setidaknya 1.500 bangunan (kebanyakan rumah) dan menembaki orang dewasa yang tak memanggul senjata, perempuan, hingga anak-anak. Warga lain yang selamat tetap mendapat perlakuan keras yang merendahkan martabat manusia.

Dunia yang terkejut sekaligus geram kebanyakan diberi narasi konflik antar-agama dan antar-etnis oleh media massa arus utama.

John McKisick, kepala organisasi untuk pengungsi PBB, mengatakan pemerintah Myanmar sedang melaksanakan pembersihan etnis. Kesimpulan Human Right Watchjuga sama. Sementara publik di Indonesia banyak yang mereduksi apa yang terjadi di Rakhine sebagai genosida

sistematis dengan korban warga muslim Rohingya sehingga memunculkan negara66i SARA bermodalkan *hoax*.

Saskia Sassen, negara66i Sosiologi di Columbia University dan penulis *Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy* (2014), menilai konflik antar-agama di Rakhine adalah puncak gunung es dari akar masalah yang lain, yakni konflik perebutan lahan dan sumber daya alam. Pelaku utamanya adalah pemerintah Myanmar dan rezim militernya yang masih kuat bercokol di tubuh pemerintahan hingga saat ini.

Myanmar, tulis Sassen di *The Guardian*, adalah salah satu negara di Asia yang mayoritas masyarakatnya masih menggantungkan pekerjaan di negara agrikultur, pertambangan, dan ekstraksi air sederhana. Di sisi lain, Myanmar menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah, salah satunya gas alam. Apalagi posisi Myanmar berada di antara dua raksasa Asia, Cina dan India, yang sedang lapar-laparnya terhadap pelbagai macam SDA untuk modal akselerasi pembangunannya.

2012: Masa Genting bagi Rohingya, Tahun Penting bagi Investor Asing

Tahun 2012 adalah tahun penting bagi awal mula makin panasnya konflik lahan di Myanmar. Undang-Undang Petani pernah disahkan pada 1963 atau di era Myanmar cenderung sosialis. Tujuannya untuk melindungi lahan dan penghidupan petani kecil di seluruh negeri. Sayangnya, pada 2012, UU ini dibatalkan oleh parlemen Myanmar (yang sejak tahun lalu didominasi oleh kalangan militer).

Pada 30 Maret 2012, parlemen Myanmar juga menerbitkan revisi atas dua undang-undang pertanahan, yakni UU Pertanian dan UU Lahan Kosong. Keduanya mengizinkan 100 persen modal asing dengan masa sewa lahan hingga 70 tahun.

Dibandingkan pertambangan, negara pertanian masih memiliki sejumlah batasan untuk investasi asing karena pemerintah mempromosikan usaha patungan dengan menggaet pengusaha begar. Namun, UU ini memunculkan para pemodal asing nakal yang sering menggunakan perusahaan begar sebagai *proxy* dalam upaya menanamkan investasi, demikian dalam laporan Forest Trend Report Series.

Sebagian besar penduduk Myanmar menggantungkan hidupnya di ranah agrikultur. Demikian pula etnis Rohingya, yang kebetulan mayoritas beragama Islam. Jika pun tak memiliki tanah, mereka tetap menggantungkan profesinya sebagai buruh tani dengan pendapatan tak seberapa.

Sejak UU pro-investor diterbitkan pada 2012, gelombang pebisnis multinasional membanjiri Myanmar. Mereka diuntungkan sebab didukung rezim militer saat akan mengambil alih lahan para petani. Sebuah praktik yang sebenarnya telah dimulai sejak era 1990-an. Praktik ini berlangsung kejam, sebab rata-rata petani tak mendapat ganti rugi dan, jika melawan, akan mendapat

intimidasi hingga timah panas, tulis Sassen merujuk pada data COHRE Country Report.

Pada saat bersamaan, tahun 2012 juga tahun paling berdarah bagi orang-orang Rohingya. Konflik berdarah meletus yang membuat 7egara 100 orang (sebagian besar muslim Rohingya, sisanya warga Buddha) meninggal dan 90.000 lain dipaksa meninggalkan rumahnya. Hampir 3.000 bangunan dibakar, dan 1.300-nya milik warga Rohingya dan sisanya milik warga Rakhine yang menganut agama Buddha.

Orang-orang Rohingya sudah terbiasa diintimidasi sejak lama. Namun, mereka mulai meninggalkan Myanmar dalam jumlah besar usai 7egara7 tersebut. PBB memperkirakan jumlah imigran Rohingya, yang dijuluki manusia perahu, kurang lebih 160.000 orang. Mereka meminta belas kasihan dari 7egara-negara tetangga seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, dan 7egara moyang mereka, Bangladesh.

Mayoritas media massa saat itu membingkai peristiwa tersebut dengan pendekatan konflik antar-agama. Namun, Sassen menilai kasus ini juga berakar pada kebijakan alih fungsi lahan yang dijalankan pemerintah Myanmar melalui pasukan militer.

Sassen berkaca pada data COHRE Country Report yang menunjukkan alokasi luas lahan untuk proyek pemerintah meningkat 170 persen antara 2010-2013. Tragedi Rohingya pada 2012, menurut Sassen, bukanlah kejadian 7egara7iv tanpa ada campur tangan 7egara.

“Kita harus bertanya apakah penganiayaan yang kejam terhadap kelompok Rohingya (dan kelompok minoritas lain) juga disebabkan oleh kepentingan ekonomi-militer, bukan hanya karena isu agama atau etnis. Sampai batas tertentu, 7egar dunia internasional pada isu agama menutupi kasus perampasan lahan yang luas dan telah memengaruhi jutaan orang, termasuk warga etnis Rohingya” tegas Sassen.

Sassen menilai, mengeluarkan warga Rohingya dari tanah airnya akan bagus untuk bisnis di masa depan.

Baru-baru ini, catat Sassen, pemerintah Myanmar telah mengalokasikan 1.268.077 hektare lahan di wilayah tempat tinggal warga Rohingya di Rakhine untuk pengembangan program pembangunan tempat tinggal perusahaan. Luasnya melonjak 7egara7iv alokasi yang disebut pemerintah pada 2012, yakni 7.000 hektare.

Modal Asing Mengalir ke Rakhine, Suara Kritis Bermunculan

Selain mengusir pemilik lahan yang ditargetkan akan dipakai untuk investasi, pemerintah Myanmar aktif menarik minat pemodal asing. Sebagaimana diberitakan *Bloomberg* pada pertengahan Februari lalu, pemerintahan yang

dipimpin Aung San Suu Kyi kembali menggiatkan promosi kerja sama ekonomi kepada pebisnis dunia, terutama negara-negara tetangga.

Suu Kyi dan jajaran birokrat Myanmar lain menilai langkah ini akan efektif menanggulangi konflik di Rakhine yang makin panas. Klaim ini dibantah mentah-mentah oleh pelbagai pihak yang kritis terhadap pemerintah, termasuk perwakilan PBB di Myanmar, Yanghee Lee.

Terlepas dari klaim-klaim itu, investasi asing memang benar-benar datang ke Myanmar dalam beberapa tahun terakhir. Perwakilan dari Thailand, misalnya, dua tahun lalu berkunjung ke Negara Bagian Rakhine untuk melihat potensi bisnis alam di daerah Ngapali, Thande, Kyaukpyu, Sittwe, dan Mrauk U.

Cina adalah salah satu investor asing yang paling “lapar” dalam menanamkan investasinya di Myanmar. Tahun lalu, CITIC Group memenangi kontrak untuk membangun pelabuhan di Kyaukpyu, Rakhine, daerah berbatasan langsung dengan Bangladesh di utara dan Teluk Benggala di barat.

Kyaukpyu sangat diminati Cina karena hubungan darat dengan Myanmar dapat mengurangi ketergantungan Cina atas perjalanan lebih jauh melewati Selat Malaka. Dengan cukup melewati Kyaukpyu, perjalanan membawa barang dagangan dari India ke Cina bisa dihemat hingga 5.000 kilometer. Upaya mendiversifikasi rute pengiriman barang sekaligus meningkatkan pengaruh ekonomi di negara-negara tetangga adalah salah satu dorongan utama dalam inisiatif “One Belt One Road” Cina.

Meski terkait misi “One Belt One Road”, pengaruh investasi Cina di Myanmar sesungguhnya telah terasa sejak 2009. Saat itu Kementerian Energi Myanmar menandatangani nota kesepahaman dengan China National Petroleum Corp. (CNPC) atas pembangunan pipa minyak yang menghubungkan Pulau Maday di Kyaukpyu dan Provinsi Yunan di Cina.

Pada tahun yang sama CITIC Group menandatangani Nota Kesepahaman yang terpisah dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ekonomi Myanmar untuk membangun jaringan pelabuhan laut dan kereta api di Zona Ekonomi Khusus Kyaukpyu. Proyek ini dikabarkan tak pernah terealisasi hingga MoU-nya kedaluwarsa pada 2014.

Salah satu penyebabnya ditengarai ada elemen rakyat Myanmar yang kritis terhadap Zona Ekonomi Khusus Kyaukpyu di Negara Bagian Rakhine, terutama mereka yang berkecimpung sebagai aktivis lingkungan. Pokok kritiknya lagi-lagi soal lahan. Sebagaimana dilaporkan *The Diplomat*, salah satu anggota *888888* Myanmar, Ba Shin, menyatakan kekhawatirannya pada *Reuters*:

“888888 kejelasan lahan siapa yang akan disita, di atas lahan siapa proyek tersebut akan dibangun, dan bagaimana mereka (pemilik lahan) akan diberi kompensasi... Tidak ada yang diketahui tentang potensi pengembang dan investor. Ada kekhawatiran dan keraguan yang berkembang di kalangan masyarakat karena kurangnya transparansi.”

Selain minyak, Myanmar juga kaya gas alam. Menurut data yang dirilis Perusahaan Gas dan Minyak Myanmar (MOGE) dan disadur Marie Lall dalam ulasannya bertajuk “Indo-Myanmar Relations in the Era of Pipeline Diplomacy”, Myanmar punya cadangan 51 triliun kaki kubik (tfc) di 9egara lepas pantai seberang Thailand dan Bangladesh—termasuk wilayah laut Negara Bagian Rakhine.

Menurut paparan Lall, ekstraksi dan ekspor gas alam Myanmar di kedua lepas pantai telah dilakukan sejak era 1980-an. Ekspornya dulu masih di 9egara-negara tetangga seperti Thailand, sebelum akhirnya dilepas lebih jauh lagi.

Namun, dalam proses ini, ada campur tangan asing seperti Daewoo dan Perusahaan Gas Korea (Kogas), perusahaan pengeboran asal Korea Selatan, dan dua lain dari India, ONGC Videsh Limited (OVL) dan Otoritas Gas India (GAIL). Perusahaan-perusahaan inilah yang menanamkan pipa-pipa penyalur gas sepanjang Rakhine.

Investasi asing juga kerap jadi sumber derita dalam bentuk kerja paksa di Rakhine. Menurut sumber kredibel yang dikutip Lall, pada 2004, Konfederasi Internasional Serikat Pekerja Bebas (ICFTU) mengklaim ada praktik kerja paksa untuk pembangunan jalan dan barak militer, dan bukti dari kasus ini bisa dilihat secara 9egara9 di Negara Bagian Rakhine dan Chin.

Aktivis Myanmar tak tinggal diam dalam situasi ini. Sebagaimana arsip *Morningstar*, akhir Februari kemarin, Ro Nay San Lwin, blogger dan salah satu pendiri gerakan online #WeAreAllRohingya, meminta agar perusahaan asing perlu berhenti berinvestasi di Myanmar. Investasi, dalam pandangannya, jadi salah satu faktor utama mengapa diskriminasi 9egara terhadap minoritas muslim Rohingya terus berlangsung.

“Kita tidak bisa memaksa pemerintah Barat untuk memberikan sanksi kepada Myanmar, tapi kita bisa berbicara dengan bisnis. Kami ingin perusahaan multinasional dengan kepentingan bisnis di Myanmar memberi tekanan pada pemerintah,” katanya.

Cuci Tangan Pemerintah Myanmar Lewat Politik *Divide et Impera*

Orang-orang Rohingya tergolong miskin. Lebih dari 78 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, demikian menurut Bank Dunia.

Rakhine adalah salah satu 9egara bagian Myanmar yang paling tidak berkembang, dengan lahan luas dan menyimpan potensi alam berlimpah. Kemiskinan memungkinkan pengusiran orang-orang malang itu demi membuat ruang bisnis bagi proyek-proyek pembangunan 9egara maupun perusahaan asing.

Pada akhirnya, menurut Sassen, ada dua fungsi dari kebijakan pengusiran orang Rohingya.

Pertama, untuk mengambil alih lahan serta segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Agar penguasaan ini bersifat permanen, pengusiran warga Rohingya juga harus permanen. Inilah mengapa tentara Myanmar tak hanya mempersekusi warga Rohingya, tetapi juga membakar rumah dan bangunan penting milik mereka. 10egara10 yang namanya tanah air jika rumah sudah rata tanah dan berganti bangunan yang merepresentasikan proyek pemerintah dan swasta.

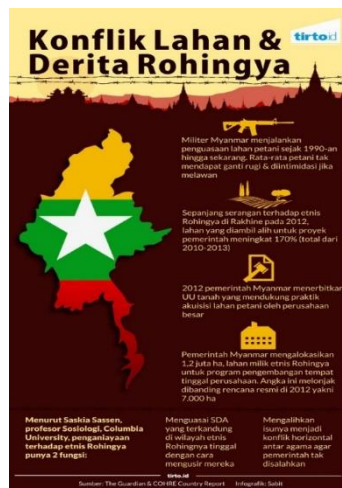
Kedua, pemerintah Myanmar tahu—dan keadaan di lapangan juga menunjukkan—bahwa korban dari perampasan lahan meliputi orang-orang Muslim, baik etnis Rohingya maupun bukan, juga umat Buddha yang jadi mayoritas di 10egara tersebut.

Agar perampasan lahan tidak menjadi isu utama yang berpotensi menggerakkan penduduk Rakhine dalam sebuah agenda ekonomi-politik yang padu, maka isunya dibelokkan menjadi menjadi konflik horizontal antar kelompok agama. Di banyak tempat, termasuk konflik Poso di Indonesia misalnya, *framing* konflik horizontal kerap dipakai untuk menjauhkan 10egara dan kebijakannya dari tanggung jawab meski ditengarai sebagai salah satu elemen yang memulai konflik.

Direktur Burma Human Rights Network (BHRN) Kyaw Win bersepakat dengan teori kedua. Dalam wawancara khusus bersama *Tirto*, ia berkata biksu-biksu di Myanmar yang sesungguhnya cinta damai dijadikan alat politik oleh elite militer untuk mengusir orang-orang Rohingya dari tempat tinggalnya. Tujuannya adalah kontrol penuh, sehingga para biksu tersebut dibenturkan dengan umat Islam di Myanmar.

“Mereka hanya dijadikan alat politik. Dalam pidato-pidatonya, mereka akan cerita tentang kehancuran Buddha di beberapa 10egara, termasuk Indonesia. Hal itu dijadikan alasan mengapa Rohingya harus dienyahkan dari negeri mereka, jika tidak, mereka yang akan tersingkir,” jelas Kyaw Win.

“Ini yang didengar anak-anak hingga orang dewasa. Bayangan apa jadinya anak-anak ini sepuluh tahun mendatang, mereka akan sangat membenci Muslim.”



BERITA 4



Gambar 4 Berita Tirto.id
Rumah warga Rohingya

Selasa malam, 5 September, juru bicara lembaga Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR), Duniya Aslam Khan, mengatakan sekitar 123.000 pengungsi telah tiba di Bangladesh sejak kekerasan terjadi di utara negara bagian Rakhine sejak akhir Agustus lalu.

Ia berkata, rombongan muslim Rohingya berhasil ke Bangladesh dalam kondisi buruk. Sebagian besar telah berjalan sehari-hari dari desa mereka, bersembunyi di hutan dan menyeberangi pegunungan dan sungai.

“Mereka lapar, lemah, dan sakit,” tutur Duniya.

Gelombang pengungsi baru bertebaran di pelbagai lokasi di tenggara Bangladesh. Lebih dari 30.000 orang Rohingya diperkirakan telah mencari perlindungan di kamp pengungsi Kutupalong dan Nayapara.

Sisanya tersebar di penampungan sementara di beberapa desa di kawasan perbatasan Bangladesh-Myanmar. Diperkirakan, masih banyak ribuan pengungsi lain yang masih tertahan dan tak bisa masuk Bangladesh.

“Kami terus melakukan advokasi dengan pihak berwenang Bangladesh untuk mengizinkan jalan yang aman bagi orang-orang yang melarikan diri dari kekerasan,” harap UNHCR.

Memblokir Bala bantuan

Anuwar adalah mahasiswa semester II jurusan Fisika, Universitas Sittwe. Ia mesti segera pulang ke Tumburu, Maungdaw, sesudah kerusuhan. Desanya dibakar habis oleh milisi Buddha dan militer Myanmar; beberapa anggota keluarganya dibunuh dan nasibnya tak jelas entah kemana.

Lewat akun *Facebook*, ia sering mengabarkan kondisi terbaru apa yang terjadi di Maungdaw. Sejak sepekan lalu, Anuwar berhasil memasuki Bangladesh.

"Saya sudah masuk Bangladesh setelah empat hari tertahan di perbatasan, doakan saya," katanya lewat pesan pendek kepada saya.

Sittwe adalah ibu kota Provinsi Rakhine, letaknya 100 kilometer ke arah tenggara dari Maungdaw. Di Sittwe, Anuwar sering bekerja membantu beberapa LSM internasional untuk "menyelundupkan" bala bantuan ke daerah utara Rakhine. Selama ini, daerah-daerah seperti Maungdaw, Buthidaung, Zawmadar, dan Al le Than Kway, memang minim bala bantuan dari luar.

Kata Anuwar, daerah utara Rakhine berstatus wilayah pemukiman, berbeda dari kawasan Sittwe yang ditetapkan junta militer sebagai kawasan pengungsi.

Saat ini di Sittwe terdapat lebih dari 20.000 hingga 25.000 kepala keluarga atau 130.000 - 150.000 pengungsi yang ditampung di dalam 15 kamp terpisah.

Saat konflik Rohingya meletus pada 2012 dan 2016, kerusuhan terpusat di sekitar Sittwe, yang makin menyuburkan kamp-kamp pengungsi baru.

"Selama ini bantuan dari dunia luar memang terpusat di Sittwe. Pemerintah jarang membukakan akses bantuan ke daerah lain," katanya.

Sejak 2016, kawasan utara Rakhine mulai memanas lantaran milisi Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) semakin aktif melawan. Operasi militer kecil-kecilan sering dilakukan pihak militer.

Laporan pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Maungdaw dan Buthidaung acap kali terjadi, tetapi pemerintah Myanmar menutupi isu itu dengan mengisolir kawasan utara Rakhine dari sorotan LSM internasional. Mereka yang sempat ditolak masuk ke areal ini adalah perwakilan PBB dan Amnesty International pada awal 2017.

Beberapa LSM internasional mencoba mengakalnya dengan menyelundupkan bantuan secara sembunyi-sembunyi.

Menurut Anuwar, barang yang dibawa dari Sittwe biasanya dikawal oleh oknum militer yang bisa disogok.

"Kami harus menyogok para biksu dan pejabat militer untuk mendapatkan akses itu," tambahnya.

Terkadang koordinasi dilakukan dengan pemerintah lokal setempat, dan tentu saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

"Mereka biasanya akan mengizinkan jika 60-70 persen bantuan diserahkan kepada biksu juga. Di sana memang daerah miskin, dan yang membutuhkan memang tidak hanya etnis Rohingya," kata Anuwar lagi.

Sejak konflik meletus pada 25 Agustus lalu, seorang pejabat PBB kepada *The Guardian* menyebut rezim junta militer Myanmar telah memblokir semua badan bantuan PBB untuk memberikan pasokan makanan, air, dan obat-obatan penting kepada ribuan warga sipil yang putus asa di kawasan utara Rakhine.

Pergerakan beberapa LSM internasional pun dibatasi. Ini adalah eksekusi tuduhan pemerintah yang menyebut beberapa LSM terlibat menyalurkan bantuan kepada "milisi pemberontak."

"Kami mendesak semua pemangku kepentingan menghentikan penyebaran keliru yang tidak hanya memperburuk ketegangan, tetapi juga mengancam keselamatan dan keamanan pekerja bantuan kemanusiaan dan menghambat menyediakan layanan kemanusiaan," ujar asosiasi LSM internasional dalam keterangan pers.

"Kami meminta pemerintah Myanmar membuka kembali akses terhadap daerah yang terpapar dampak konflik," harap mereka.

Perlu Menyogok agar Bantuan Tersalurkan

Setelah tiba di Bangladesh, Anuwar berjumpa dengan LSM internasional yang mempekerjakannya di Sittwe. Akses tertutup ke utara Rakhine membikin banyak LSM internasional kini mengalihkan operasinya ke perbatasan Bangladesh di Cox's Bazar, khususnya Kamp Leda dan Nayapara.

Dua kamp ini terletak di pesisir sungai Naf. Sungai inilah yang memisahkan Myanmar dan Bangladesh. Ribuan muslim Rohingya nekat menyeberangi sungai agar bisa keluar dari teritori Myanmar. Banyak di antara mereka tewas ketika menyeberangi sungai Naf.

Lebih ke utara kamp lain adalah Kutopalong, Ukhia. "Saya di Kutopalong, dari desa saya di Tumbru tidak perlu menyeberangi sungai untuk bisa melintasi Bangladesh. Hanya jalur darat. Tapi lebih berbahaya kami yang tidak bisa sembarang menyeberang karena tentara Myanmar berjaga di perbatasan dan terkadang menembaki kami," kata Anuwar.

Di Kutopalong, ia sempat diminta kembali ke perbatasan bersama seorang staf lokal dari Bangladesh. Tugasnya memberikan sedikit bantuan makanan kepada mereka yang masih tertahan.

"Jumlahnya sedikit, tidak banyak, hanya satu atau dua karung. Dan isinya hanya makanan," ungkapnya.

Untuk bisa masuk tentu tidak mudah, karena meski menyogok tentara perbatasan, baik tentara Myanmar maupun tentara Bangladesh. "Biaya sogok terkadang lebih besar ketimbang barang yang kami bawa," ujar Anuwar.

Apakah Dibuka Akses Membuat Bantuan Jatuh ke Tangan yang Tepat?

Dalam konteks konflik di kawasan utara Rakhine yang terjadi baru-baru ini, alur bantuan memang lebih difokuskan di perbatasan Bangladesh ketimbang lewat jalur Myanmar. Opsi ini dinilai lebih realistis agar bantuan bisa tepat sesuai sasaran. Pilihan inilah yang diambil oleh lembaga bantuan asal Indonesia, Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Wakil presiden senior ACT, Syuhelmaidi Syukur, mengatakan sejak akses ke utara Rakhine tertutup pada 2016, pihaknya mulai mengalihkan bantuan ke Bangladesh.

"Bukan berarti kami masuk ilegal ke Myanmar, toh di Bangladesh juga banyak pengungsi Rohingya, jumlahnya ratusan ribu," katanya kepada saya di Jakarta.

Upaya untuk menembus Maungdaw sempat dilakukan pada 2016. Dan akses itu terbuka setelah diplomasi politik Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan pusat pemerintahan Myanmar di Naypyidaw. Sebelum berdiplomasi, Menlu Retno Marsudi terlebih dulu mengoordinasikan beberapa LSM yang sering mengirim bantuan ke Myanmar.

Namun, kata Syuhelmaidi, aliansi ini tidak berjalan optimal. Sebab, meski bisa menembus Maungdaw dan Buthidaung, akses yang diberikan militer tetap saja terbatas. Militer tetap mengawasi dan mengontrol alur distribusi bantuan.

"Kami enggak bisa memberi ke siapa yang ingin kami bantu. Kami ingin bantuan kami jatuh ke tangan yang betul-betul membutuhkan. Karena enggak maksimal, kami tidak terlibat lagi dan mengalihkan ke Bangladesh," ucapnya.

Direktur Eksekutif Burma Human Right Network (BHRN), Kyaw Win, kepada saya mengatakan bahwa biasanya distribusi bantuan internasional yang disalurkan lewat pemerintah terlebih dulu disortir.

"Hampir 40 persen bantuan untuk etnis Rakhine dan 60 persen untuk Rohingya. Namun, di saat genting seperti ini, militer menutup semua akses bantuan kepada Rohingya di seluruh provinsi Rakhine, tidak semata di kawasan utara saja," katanya.

Hal senada dikatakan Joserizal Jurnalis dari lembaga Mer-C. "Militer biasanya menyarankan bantuan diberikan kepada kedua belah pihak. Ada juga memang pengungsi Buddha, tapi jumlahnya teramat kecil dibanding Rohingya," ujarnya.

Ia mengatakan, alur bantuan ke Myanmar akan lebih mudah jika dilakukan secara legal—artinya lapor terlebih dulu ke pemerintah lokal dan militer. Pada beberapa kasus, banyak juga LSM internasional yang diusir.

"Kalau kami terang-terangan. Tampak muka dan lobi. Awalnya militer memang kaku, tetapi mereka juga bisa bercanda. Intinya, bantuan harus diketahui," ujar Joserizal.

Meski begitu, ujar Joserizal, biasanya militer akan terlibat langsung mengawal bantuan. Dan terkadang meminta bantuan diberikan kepada non-Rohingya.

Aliansi Bantuan dari Indonesia lewat Kemenlu

Kementerian Luar Negeri pekan lalu membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi ini terdiri 11 lembaga kemanusiaan. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terlibat bersama dengan ACT, Rumah Zakat, Dompot Duafa, dan PKPU yang pernah lebih dulu menyalurkan bantuan ke Rohingya.

Ketika ditanya soal program AKIM, Syuhalmaedi dari ACT mengatakan belum tahu detailnya seperti apa. "Kami hanya diundang saja oleh Kemenlu," katanya.

AKIM disebut menjadi "kepanjangan tangan" Kemenlu dan pemerintah Indonesia untuk menyalurkan bantuan di Rakhine. Hubungan ini membikin LSM Indonesia akan semakin intens dengan junta militer.

Ali Yusuf, Ketua AKIM yang juga perwakilan LPBI NU, menyebut AKIM akan memiliki kelebihan tersendiri saat mengurus izin.

"Adanya AKIM jadi bisa lebih cepat, sekali izin 11 lembaga ini bisa langsung jalan," tuturnya kepada saya, kemarin (5/9).

Ketika ditanya soal pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran dan tidak terfokus di Sittwe, Ali menampik kekhawatiran itu. Menurutnya, pemerintah Myanmar sudah sepakat bahwa mereka akan membuka akses seluas-luasnya di Sittwe dan Maungdaw.

"Itulah pentingnya diplomasi pemerintah. Kita manfaatkan," tambah Ali.

Kyaw Win dari BHRN berkata baru mendengar soal rencana dibukanya akses ke utara Rakhine. Ia paham ini adalah imbas positif dari pertemuan antara Menlu Retno Marsudi dan Aung San Suu Kyi. Namun, ia menilai, hal ini hanyalah "basa-basi politik."

"Saya tidak yakin mereka akan mengizinkan bantuan masuk," ucapnya.

'Keberhasilan' diplomasi politik Indonesia untuk meminta dibukakan akses bantuan dan penghentian kekerasan disikapi penuh optimisme dan pesimisme oleh beberapa LSM internasional di Myanmar.

Mereka yang optimis mengharapkan Indonesia jadi pendobrak awal blokade bantuan kemanusiaan. Bagi yang pesimis, penerimaan Menlu Indonesia oleh Aung San Suu Kyi tidak akan mengubah apa pun.

Toh, jika pun diterima, belum tentu didengar; dan bila didengar, belum tentu dilakukan. Dan jika dilakukan, belum tentu pemerintah Myanmar serius melakukannya.



BERITA 5



Gambar 5 Berita Tirto.id
Pengungsi Rohingya Menyebrang Perbatasan Rakhine

Pihak militer Myanmar diduga memasang ranjau di wilayah perbatasan Rakhine. Dalam hasil investigasi yang dilakukan langsung oleh Amnesty Internasional mendapati informasi dari sejumlah pihak bahwa pemerintah menanamkan ranjau di sekitar perbatasan.

Direktur Amnesty Internasional Usman Hamid menerangkan, tim respon Amnesty Internasional sudah menemukan indikasi ranjau tersebut sejak pertama konflik pecah. Kala itu, tim mewawancarai langsung para korban tidak lama setelah kejadian penyerangan berlangsung.

"Di dalam kunjungan pertama kami temukan 3 orang yang terkena ranjau," kata Usman Hamid dalam konferensi pers di Menteng, Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Mereka menemukan potongan kaki dari seorang perempuan yang berusia puluhan tahun dan anak-anak berumur 10-13 tahun. Info terakhir, mereka pun tewas akibat ranjau. Namun, mereka kala itu baru sebatas wawancara dengan para korban.

Temuan tersebut dibuktikan secara resmi oleh peneliti Amnesty Internasional yang ditugaskan khusus ke Myanmar. Dalam temuan tersebut, mereka menemukan bukti kuat bahwa militer Myanmar menggunakan ranjau.

"Kami memiliki bukti bahwa kelompok militer Myanmar memang telah menanam ranjau di suatu petak tanah kecil perbatasan antara Bangladesh dan Myanmar," kata peneliti Amnesty Internasional untuk Myanmar Laura Haigh menambahkan penjelasan Usman Hamid.

Laura menerangkan, salah satu saksi mata yang menyatakan bahwa mereka melihat militer Myanmar melakukan patroli di sekitar pagar pembatas. Mereka

berhenti di satu tempat kemudian menggali tanah untuk menanam ranjau. Bahkan, narasumber mereka menunjukkan barang mirip ranjau.

"Salah seorang narasumber kami menyatakan bahwa mereka melihat seperti mangga yang berwarna hitam di mana ketika kami cocokkan itu sesuai dengan karakter dari ranjau," ujar Laura.

Pihak Amnesty pun sudah memastikan dengan membawa kepada ahli senjata. Tim ahli senjata pun menyebutkan bahwa benda mirip mangga sebagai ranjau darat.

Penanaman ranjau tersebut diduga untuk mengamankan perbatasan. Pemerintah Myanmar ingin agar tidak ada warga memasuki perbatasan. Namun, ranjau tersebut diduga juga digunakan untuk memaksa etnis Rohingya untuk tidak kembali ke Myanmar.

Sampai saat ini, pihak Amnesty Internasional mendapat informasi sejumlah masyarakat Rohingya menjadi korban ranjau. Saat ini, sudah ada 5 orang menjadi korban dari ranjau tersebut. Bahkan, kemarin kembali terdengar ledakan ranjau di wilayah perbatasan. Akan tetapi, mereka belum tahu detil karena tengah mengonfirmasi ledakan tersebut. Namun, sampai saat ini, baru satu orang meninggal dunia akibat ranjau selama ini.

BERITA REPUBLIKA *ONLINE*

BERITA 1



Gambar 1 Berita Republika Online
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, (PDI Perjuangan) mengecam penindasan yang terjadi atas etnis Rohingya di Myanmar baru-baru ini. "PDI Perjuangan mendesak pemerintah Indonesia untuk secepatnya memberikan bantuan kemanusiaan dan langkah diplomasi," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (2/9).

Kejahatan kemanusiaan, kata dia, tidak bisa dibiarkan dan harus dihentikan. PDI Perjuangan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri bertindak cepat dengan segera datang ke Myanmar.

Pada saat bersamaan, kata Hasto, PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan secepatnya melakukan diplomasi untuk meyakinkan pemerintah Myanmar guna mencari jalan damai untuk menyelesaikan persoalan. Indonesia sebagai Big Brother di ASEAN, menurut dia, harus mengambil inisiatif atas konflik Rohingya.

Dasarnya sangat kuat, yakni politik luar negeri Indonesia bebas aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia. Atas nama cita-cita perdamaian sebagai pelaksanaan sila kedua kemanusiaan atau internalisonalisme, prakarsa aktif harus diambil, termasuk mendesak pemerintahan Myanmar untuk secepatnya menghentikan kekerasan atas warganya.

PDI Perjuangan berpendapat bahwa tindakan diplomasi yang cepat dan efektif melalui ASEAN sangat penting guna mencegah kekerasan lebih lanjut. "PDI Perjuangan akan ikut ambil bagian dalam gerakan solidaritas sebagai kekuatan moral untuk mencegah kekerasan lebih lanjut di Rohingya," kata Hasto.

BERITA 2



Gambar 2 Berita Republika Online
Presiden Turki, Erdogan
Desak Pemimpin Dunia Bantu Muslim Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Senin, bahwa ia mendesak para pemimpin dunia untuk berbuat lebih banyak guna membantu Muslim Rohingya Myanmar, yang kini menghadapi tindakan upaya genosida. Hampir 400 orang tewas di Myanmar barat laut pada pekan lalu, dalam sebuah serangan yang dilancarkan oleh gerilyawan terhadap sejumlah pos keamanan dan memicu serangan balasan dari pihak tentara.

Badan-badan bantuan memperkirakan bahwa 73.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar ke negara tetangganya, Bangladesh, sejak kekerasan terjadi. "Anda dapat melihat situasi dimana Myanmar dan Muslim berada," kata Erdogan di Istanbul, ketika ia menghadiri pemakaman seorang tentara Turki.

"Anda dapat melihat bagaimana desa-desa dibakar. Kemanusiaan tetap diam terhadap pembantaian di Myanmar," tambahnya.

Ia mengatakan bahwa Turki akan mengangkat permasalahan tersebut di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York pada akhir bulan ini. Sebagai pemimpin Organisasi Konferensi Islam (OKI), Erdogan telah membahas kekerasan kemanusiaan di Myanmar dengan 20 pemimpin dari negara anggota OKI.

"Dengan beberapa pemimpin, kami dapat mencapai kesepakatan dan terdapat beberapa yang tidak tercapai. Tidak semua orang memiliki kepekaan yang sama," katanya. "Kami akan melakukan tugas kami," kata Erdogan. Ia menambahkan bahwa Turki akan terus memberikan bantuan ke wilayah tersebut.

Myanmar telah mendesak kepada umat Islam di wilayah barat laut agar mau bekerja sama dalam mencari para pemberontak, yang menggalang serangan terhadap sejumlah pos keamanan dan memicu serangan balasan serta tindakan keras dari pihak tentara.

Serangan tersebut menjadi salah satu kekerasan paling mematikan yang melanda masyarakat Rohingya dalam beberapa dasawarsa belakangan. Perlakuan diskriminatif Myanmar, yang sebagian besar penduduknya beragama Buddha, terhadap 1,1 juta Muslim Rohingya menjadi tantangan terbesar bagi pemimpin Aung San Suu Kyi, yang juga dikecam oleh para pembela HAM karena membiarkan penganiayaan terjadi terhadap kelompok minoritas.

Erdogan mengatakan pada Jumat, bahwa kematian ratusan warga Rohingya di Myanmar selama sepekan belakangan, merupakan suatu bentuk genosida terhadap masyarakat Muslim di wilayah itu.

Ratusan lagi pengungsi pada Minggu, berjalan melintasi persawahan dari sungai Naf yang memisahkan kedua negara itu. Mereka mencoba masuk ke wilayah Bangladesh, menambah tekanan pada kelangkaan sumber daya yang dimiliki badan bantuan dan masyarakat setempat, yang sudah membantu puluhan ribu pengungsi dari serangan sebelumnya di Myanmar.

BERITA 3



Gambar 3 Berita Republika Online
Aksi Protes Tragedi Rohingya di Bangladesh

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Fokus media global dalam menganalisa krisis Rohingya di Myanmar disebabkan oleh kebencian agama antara mayoritas Buddha terhadap minoritas Muslim. Seperti dilansir Aljazirah, saat itu, ada harapan tinggi bahwa kemenangan elit partai Aung San Suu Kyi pada November 2015 akan membawa keadilan.

Namun, rupanya Suu Kyi malah meminta agar AS tidak menggunakan kata Rohingya. Menurut juru bicara Suu Kyi, istilah Rohingya tak berguna dalam proses rekonsiliasi nasional.

Menurut Saskia Sassen alias Profesor Sosiologi Columbia University, Robert S. Lind, pengusiran etnis Rohingya dari tempat tinggalnya tak hanya disebabkan oleh masalah agama. Ada perampasan tanah yang diam-diam diabaikan.

Sebenarnya, militer telah mengambil alih tanah dari petani Budha dan kelompok lainnya pada 1990an. Namun, pada 2012 terjadi perubahan undang-undang yang meluas dan secara formal membuka negara kepada investor asing.

Pada tanggal 30 Maret 2012, majelis tinggi dan majelis rendah parlemen menyetujui revisi dua undang-undang pertanahan, Undang-undang Pertanian dan Undang-undang Lahan Kosong. Ini adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing baru yang mengizinkan 100 persen modal asing, dan masa sewa sampai 70 tahun.

Dibandingkan dengan pertambangan, sektor pertanian masih memiliki beberapa batasan dalam investasi asing karena pemerintah mempromosikan usaha

patungan dengan pengusaha lokal. Namun, perusahaan asing sering menggunakan perusahaan lokal sebagai alat untuk investasi.

Saat ini era ekonomi baru pertambangan, kayu, proyek panas bumi. Pembangunan ekonomi mungkin memerlukan ini semua. Pembangunan ini membutuhkan banyak lahan. Ini berarti jutaan petani kecil harus kehilangan tempat tinggal dan tidak pernah diberi kompensasi.

Investasi langsung asing sekarang terkonsentrasi di sektor ekstraktif dan pembangkit tenaga listrik. Tidak banyak investasi baru yang masuk ke sektor seperti manufaktur yang bisa menghasilkan kelas pekerja yang kuat dan kelas menengah yang sederhana. Misalnya, proyek pipa Yadana di Myanmar memerlukan investasi lebih dari 1 miliar dolar AS namun hanya mempekerjakan 800 pekerja.

Penganiayaan minoritas Muslim Rohingya yang brutal yang telah menyebabkan kekhawatiran besar di seluruh dunia. Namun, sesungguhnya yang terjadi di belakangnya, di Myanmar terjadi penggusuran petani kecil untuk memberi ruang bagi perampasan tanah secara besar-besaran.

Sejak investor asing memasuki negara tersebut, permintaan atas tanah telah menjadi faktor utama dalam konflik Myanmar. Selain Myanmar jadi perbatasan Asia terakhir untuk pembangunan perkebunan pertanian, pertambangan, dan ekstraksi air. Myanmar juga berada di antara dua negara terpadat di dunia, Cina dan India, keduanya lapar akan sumber daya alam.

BERITA 4



Gambar 4 Berita Republika Online
Pengungsi Rohingya Mengantre Bantuan di Bangladesh

REPUBLIKA.CO.ID, SITTWE - Polisi Myanmar terlibat bentrok dengan massa Buddha yang memblokir pengiriman bantuan ke Negara Bagian Rakhine, pada Rabu (20/9). Pemblokiran ini menghambat distribusi yang sangat dibutuhkan oleh Muslim Rohingya yang menjadi korban kekerasan di Rakhine.

Sebanyak 300 umat Buddha berkumpul di sebuah dermaga di Sittwe dan menghentikan kapal milik Komite Internasional Palang Merah (ICRC). Kapal tersebut membawa bantuan yang hendak dikirim ke Maungdaw melalui perjalanan sungai.

Massa memaksa kapal untuk menurunkan barang bantuan dan mencegah kapal tersebut untuk meninggalkan dermaga. Informasi ini dilaporkan oleh surat kabar Global New Light of Myanmar yang mengutip Komite Informasi Myanmar, pada Kamis (21/9).

Polisi anti huru hara tiba saat kerumunan massa mendekati dermaga. Sejumlah biksu Buddha berusaha menenangkan massa, namun massa justru mulai melempar batu dan bom Molotov ke arah polisi. Delapan orang ditahan dan beberapa polisi dilaporkan terluka. ICRC mengkonfirmasi kejadian tersebut dan mengatakan akan terus mencoba mengirim bantuan ke Maungdaw.

"Kami akan melanjutkannya, tidak ada yang ditahan," kata Graziella Leite Piccoli, juru bicara ICRC untuk Asia, dikutip Aljazeera.

Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan khawatir puluhan ribu orang yang terperangkap di Rakhine sangat membutuhkan bantuan. Akses kemanusiaan tetap sulit meski ada janji pemerintah Myanmar untuk mengizinkan jalan yang

aman. Sebuah truk milik ICRC juga dilaporkan terlibat kecelakaan di Bangladesh, yang menewaskan sembilan orang dan melukai 10 orang lainnya.

"Truk itu membawa makanan untuk pengungsi Rohingya di perbatasan, termasuk yang terdampar di pulau tak berpenghuni," kata Yasir Arafat, Wakil Kepala Polisi Distrik Bandarban.

Kelompok-kelompok bantuan kemanusiaan memperingatkan akan adanya krisis kemanusiaan di kamp-kamp pengungsian. Para pengungsi berjuang untuk membangun tempat tinggal dan mendapatkan jatah makanan. Pemerintah Bangladesh sedang membangun sebuah kamp baru yang cukup besar untuk menampung 400 ribu orang. Namun PBB mengatakan pembangunan kamp akan memakan waktu sebelum dilengkapi dengan toilet dan fasilitas medis.

Di sisi lain, Myanmar bersikeras kekerasan yang terjadi di Rakhine saat ini telah mereda. "Saya dengan senang hati memberi tahu Anda bahwa situasinya telah membaik," kata Henry Van Thio, Wakil Presiden Kedua Myanmar, dalam Majelis Umum PBB pada Rabu (20/9).

Van Thio mengatakan sudah tidak ada bentrokan sejak 5 September lalu. Ia menambahkan, pemerintahnya berkomitmen untuk mengizinkan pengiriman bantuan untuk masuk.

"Bantuan kemanusiaan adalah prioritas utama kami. Kami berkomitmen untuk memastikan bantuan diterima oleh semua pihak yang membutuhkan, tanpa diskriminasi," tutur dia.

BERITA 5



Gambar 5 Berita Republika Online
Pengungsi Rohingya Telantar di Perbatasan Akibat Terkena Ranjau Darat

REPUBLIKA.CO.ID, RAKHINE -- Pengungsi Rohingya banyak yang menderita luka-luka karena menginjak ranjau saat mereka melarikan diri dari kekerasan di Myanmar. Salah satu dari mereka, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang dirawat di Bangladesh.

Azizu Haque harus kehilangan kedua kakinya akibat ranjau. Saudaranya, di rumah sakit lain, mengalami nasib yang sama, "Luka mereka sangat buruk sehingga seolah-olah mereka meninggal. Lebih baik bahwa Allah memanggil mereka, mereka sangat menderita," kata ibu Azizu Haque.

Dokter yang merawat Azizu berusaha untuk menyelamatkan nyawa remaja tersebut. Menurut Dokter, Azizu memiliki golongan darah yang langka, dan rumah sakit tidak memiliki bank darah, dan sudah kehabisan donor.

Dilansir dari bbc.com, Selasa (12/9), seorang wanita di rumah sakit yang sama, Sabequr Nahar, mengatakan bahwa dia telah menginjak ranjau darat setelah dia dan keluarganya tertembak. Tidak jelas siapa yang meletakkan ranjau di lokasi tersebut.

Sabequr Nahar, mengatakan dia melarikan diri dari Myanmar karena militer telah menargetkan komunitasnya, dan dia melintasi perbatasan dengan ketiga anaknya saat dia menginjak ranjau darat.

Sementara itu, di sebuah rumah sakit di negara tetangga Bangladesh ada lima pasien dengan luka parah akibat ranjau darat. Tidak jelas siapa yang meletakkan ranjau yang menyebabkan pengungsi Rohingya menderita luka-luka. Tapi kondisi orang-orang ini tampaknya bertentangan dengan versi pemerintah Myanmar.

Kekerasan dimulai pada 25 Agustus ketika gerilyawan Rohingya menyerang pos polisi di negara bagian utara Rakhine, menewaskan 12 petugas keamanan. Serangan tersebut memicu operasi keamanan yang besar yang telah menimbulkan kecaman internasional.

Lebih dari 300 ribu orang Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar dalam beberapa pekan terakhir. Pada hari Ahad, kelompok hak asasi manusia Amnesty International menuduh pihak berwenang menanam ranjau darat di penyeberangan perbatasan yang digunakan oleh kaum Rohingya untuk melarikan diri.

Sebuah sumber militer Myanmar mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ranjau telah ditempatkan di sepanjang perbatasan pada 1990-an dan tentara telah berusaha untuk memindahkan ranjau tersebut. Namun ia mengaku, tidak ada ranjau yang ditanam dalam beberapa hari ini.

Militer Myanmar membantah telah menanam ranjau darat baru untuk orang-orang yang mencoba melarikan diri dari kekerasan tersebut. Pada hari Senin kepala hak asasi manusia PBB Zeid Raad al-Husseini menyebutkan tindakan pemerintah Myanmar sebagai contoh pembersihan etnis.

Rohingya merupakan etnis minoritas di Rakhine telah lama mengalami penganiayaan di Myanmar. Mereka disebut imigran ilegal. Bangladesh sudah menjadi tuan rumah bagi ratusan ribu orang Rohingya yang telah melarikan diri dari kekerasan sebelumnya di Rakhine.

Kamp pengungsi yang ada penuh dan pengungsi baru tidur di tempat manapun yang dapat mereka temukan. Aung San Suu Kyi, pemimpin de facto Myanmar, menghadapi kritik yang meningkat karena gagal melindungi Rohingya.